

# PROSIDING

## SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Lampung

2019

# **PROSIDING**

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

**EMERSIA HOTEL AND RESORT  
BANDAR LAMPUNG, 14 NOVEMBER 2019  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

# **PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019**

Susunan Panitia

## **Pengarah**

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

## **Penanggung jawab**

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

## **Ketua**

Prof.Dr.Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

## **Wakil Ketua**

Dr. Hartoyo, M.Si

## **Sekretaris**

Ida Ropaida IS, S.E.,M.M

## **Anggota**

Surono, S.I.Kom

Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si

Titik Ovirosita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P Siti

Marbiyah, S.Si A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinz, S.I.Kom

## **Reviewer**

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim, Ph.D

## **Editor**

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

## **Desain Cover**

Rosihin Anwar

## **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id



**KATA PENGANTAR**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS**  
**LAMPUNG**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan menyelesaikan penyusunan prosiding ini. Kegiatan seminar ini diikuti oleh para Dosen Universitas Lampung. Prosiding kali ini memuat 17 artikel yang dipresentasikan pada Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 14 November 2019 di Emersia Hotel and Resort .Tujuan dilaksanakannya seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: (1) memfasilitasi Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu terkini yang beredar di masyarakat.

Tentu masih terdapat kelemahan di dalam buku ini, oleh karena itu upaya perbaikan demi penyempurnaan akan selalu kami lakukan pada penerbitan tahun mendatang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan terhadap inisiatif LPPM Universitas Lampung. Terima kasih pula kami sampaikan terhadap seluruh Pengabdi Universitas Lampung dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Prosiding ini.

Harapan kami semoga upaya keras tersebut menjadi amal, dan berguna bagi kemajuan pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 3 Desember 2019  
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Diseminasi Hasil Riset Anti Mikroba Alami Berbasis Pemanfaatan Ekstrak Buah Mengkudu Dan Kulit Pisang Menjadi Hand Sanitizer Herbal Di Sentra Industri Keripik Pisang Lampung (Dewi Sartika, Susilawati, Neti Yuliana)..... | 1   |
| Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung (Desy Churul Aini, Siti Azizah) .....  | 17  |
| Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milinial (Heru Wahyudi, Nairobi, I Wayan Suparta).....  | 31  |
| Identifikasi Plastik Kemasan Makanan Di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan (Ilim*, Heri Satria, Kamisah D. Pandiangan, Mita Rilyanti dan Dian Herasar) .....  | 44  |
| Pelatihan Instalasi Hidroponik Dan Rumah Hijau Untuk Pertanian Pekarangan (Laksmi Irianti, Ika Kustiani, Ratna Widyawati & Amril M. Siregar)  | 57  |
| Penyuluhan Hukum Tentang Alokasi Dana Desa Di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu (Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T ) .....  | 66  |
| Pelatihan Pembuatan Alat Monitoring Stabilitas Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah Bagi Siswa-siswi SMK di Bandar Lampung (Osea Zebua, F.X. Arinto Setyawan, Syaiful Alam).....                                    | 76  |
| Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa Smu 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia dan M. Iwan Satriawan) .....                       | 84  |
| Peningkatan Kapasitas Legal Drafter Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Lampung (Candra Perbawati, Malicia Evendia dan Martha Riananda).....                           | 91  |
| Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Di Pesisir Lampung Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Heryandi, Budiyo, dan Ade Arif Firmansyah).....  | 99  |
| Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program Asi Eksklusif Di Kabupaten Pringsewu (Martha Riananda, Malicia Evendia dan Yulia Neta) .....   | 106 |

|   |     |
|---|-----|
| Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional (Yhannu Setyawan, Budiyo, Yulia Neta, dan Ade Arif Firmansyah) .....   | 113 |
| Bimtek Diseminasi Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang Dan Pengadilan Negeri Kelas Ii Kalianda (Rehulina, Melly Aida, Naek Siregar, Ria Wierma Putri) .....                     | 120 |
| Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pengelola Hutan Mangrove Dalam Mewujudkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove, Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Serly Silviyanti, Yuniar Aviati, Irwan Effendi) ..... | 127 |
| Penguatan Partisipasi Masyarakat Tentang Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Lampung Tengah (Siti Azizah , Melly Aida, Desy Churul A, Deddy Aprilan) .....   | 142 |
| Penyuluhan Hukum Tentang Uu Ite Sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya Di Sma Alhuda Kabupaten Lampung Selatan (Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani) .....  | 150 |
| Pemberdayaan Bagi Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Desa Wisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak (Dwi Wahyu Handayani, Yuni Ratnasari, Indra Jaya Wiranata) .....                      | 158 |

# **PENDAMPINGAN PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DESA DI PESISIR LAMPUNG UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA**

**Heryandi<sup>1\*</sup>, Budiyo<sup>2</sup>, dan Ade Arif Firmansyah<sup>3</sup>**

*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung*

*Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145*

E-mail: [sheryandi@ymail.com](mailto:sheryandi@ymail.com)

## **Abstrak**

Adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan secara horizontal maupun vertikal dalam perencanaan pembangunan desa, mengakibatkan peranan pemerintah desa menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa di pesisir Lampung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memaksimalkan peranan pemerintah desa di wilayah pesisir Lampung dalam upaya pembangunan kemaritiman dengan melakukan optimalisasi potensi desanya masing-masing dan mampu menuangkannya dalam dokumen produk hukum di desanya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pendampingan langsung dalam penyusunan produk hukum desa yang substansinya mengatur perencanaan pembangunan desa pesisir. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kapasitas peserta Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia telah meningkat hingga 90%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: dokumen perencanaan pembangunan desa, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah, cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** *Desa; Maritim; Visi Indonesia.*

## 1. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari temuan penelitian hibah Profesor pada tahun 2017 yang berjudul: Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi perencanaan pembangunan desa pesisir belum dapat menyentuh terhadap tujuan dari adanya peraturan (hukum, moral dan sosial) karena perencanaan pembangunan desa pesisir diatur secara umum bersamaan dengan desa-desa pada umumnya.<sup>26</sup>

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum secara vertikal dalam pengaturan di bidang perencanaan pembangunan desa pesisir dalam lingkup rezim hukumnya yang dilihat dengan menggunakan indikator muatan pengembangan wilayah, pembangunan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat secara umum menunjukkan masih terjadi disharmonisasi dan ketidaksinkronan pengaturan, seperti *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pengembangan wilayah desa dan pembangunan sumber daya manusia yang tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang ada dibawahnya dalam satu kategori rezim hukum yang sama, serta *inkorespondensi* materi muatan pengembangan wilayah pesisir yang ada dalam perda perencanaan pembangunan Propinsi Lampung yang memberikan fokus pengembangan wilayah pesisir namun tidak korespon dengan muatan perda perencanaan pembangunan kabupaten yang ada karena secara umum tidak mengurai fokus dari peraturan yang ada di atasnya. Namun terkait materi muatan partisipasi masyarakat dalam rezim hukum penataan ruang/spasial sudah menunjukkan harmonisasi pengaturan yang lebih baik dibandingkan pada rezim hukum yang lain.

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum secara horizontal dalam pengaturan di bidang perencanaan pembangunan desa pesisir secara umum materi muatannya saling bertalian (*koherensi*) tetapi tidak berkesesuaian (*inkorespondensi*), seperti yang terlihat pada fokus pengaturannya yang berkenaan dengan pengembangan wilayah pesisir (UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 17 Tahun 2007), pembangunan sumber daya manusia di desa (UU No. 17 Tahun 2007) dan partisipasi masyarakat desa (UU No. 27 Tahun 2007) yang substansinya lebih relevan dengan pembangunan desa pesisir namun undang-undang yang lain tidak berkesesuaian substansinya.

Kondisi regulasi pembangunan desa yang demikian tidak dapat menggairahkan/mengembangkan secara fokus dan terarah pembangunan desa pesisir yang dapat mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang

---

<sup>26</sup> Heryandi, Budiyono dan Ade Arif Firmansyah, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung*, Laporan Penelitian Hibah Profesor, LPPM Unila, 2017.



Kebijakan Kelautan Indonesia. Substansi peraturan tersebut menegaskan bahwa Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan mendesain kebijakan hukum pembangunan desa pesisir yang progresif dan efektif.

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mendiseminasikan hasil penelitian tersebut kepada kepala desa dan memberikan kesadaran bahwa pola pembangunan yang perlu dilakukan ditengah tidak sinkron dan harmonisnya pengaturan perencanaan pembangunan desa adalah dengan wujud upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan desa, dan sangat membutuhkan peranan kepala desa yang responsif terhadap potensi desanya baik dari sisi keunggulan kompetitif maupun komparatif.

## **2. Metode**

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan langsung dalam penyusunan produk hukum desa yang substansinya mengatur perencanaan pembangunan desa pesisir. Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan hasil penelitian hibah profesor tahun 2017 yang berjudul: Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung, sebagai basis diseminasi dalam kegiatan pengabdian kepada khalayak sasaran dalam kegiatan ini;
2. Melakukan diskusi dan tanya jawab terkait paparan yang dilakukan dan persoalan konkret pembangunan desa pesisir;
3. Melakukan guidance pada kepala desa dalam memetakan potensi desa di wilayahnya;
4. Melakukan pendampingan untuk menuangkan potensi tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan berupa produk hukum desa agar menjadi upaya yang berkelanjutan;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen produk hukum perencanaan pembangunan yang telah dihasilkan dalam kegiatan pengabdian ini.

Hasil penelitian hibah profesor tim peneliti pada tahun 2017 menunjukkan adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan secara horizontal maupun vertikal dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga peranan pemerintah desa

menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa di pesisir Lampung. Dengan masifnya dana desa pasca pemberlakuan UU Desa, sudah sepatutnya pendampingan pemerintah desa menjadi concern bagi berbagai kalangan, termasuk akademisi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan peranan pemerintah desa pesisir di Lampung tetap eksis dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kegiatan ini juga akan dilakukan dengan *transfer of knowledge* dalam melakukan drafting produk hukum desa terkait perencanaan pembangunan untuk menjamin legalitas dan sustainabilitas pembangunan desa pesisir di Wilayah Lampung.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk meningkatkan tingkat pemahaman Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest

| No | Pertanyaan  | Hasil Pretest           | Hasil Postest     | Keterangan  |
|----|---|-------------------------|-------------------|---|
| 1  | Apakah anda mengetahui dokumen perencanaan pembangunan desa?  | 40% menjawab tidak tahu | 90% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang dokumen perencanaan pembangunan desa.  |
| 2  | Apakah anda mengetahui mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya?               | 40% menjawab tidak tahu | 80% menjawab tahu | Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.               |
| 3  | Apakah anda mengetahui pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah?     | 50% menjawab tidak tahu | 90% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.     |
| 4  | Apakah anda mengetahui cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah? | 60% menjawab tidak tahu | 90% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. |

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 87,5% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang dokumen perencanaan pembangunan desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.

2. Pengetahuan tentang mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak narasumber dan peserta, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu Wisma Universitas Lampung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas peserta Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia telah meningkat hingga 90%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: dokumen perencanaan pembangunan desa, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan

pemerintah daerah, cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, narasumber dan para peserta.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir agar terus melakukan Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung sehingga dapat terus meningkatkan peranan pemerintah desa secara berkelanjutan, sehingga Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dapat diwujudkan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Diseminasi DIPA BLU UNILA Tahun 2019.

### **Daftar Pustaka**

Heryandi, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Di Era Otonomi Daerah, Disertasi, Undip, 2010.  
\_\_\_\_\_, Budiyo dan Ade Arif Firmansyah, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung*, Laporan Penelitian Hibah Profesor, LPPM Unila, 2017.



ISBN 978-602-0860-37-4

